CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN NEGARA DAN BANGSA DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Rocky Wahyu Ramadhan[1]✉, Denatasah Bunga Lestari [2], Afifah Nur Rohman[3], Muhammad Satria Hafiz Susilo[4], Vandez Aziz Marantino[5]
[1,2,3,4,5]Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi

✉ Corresponding author: rockywahyuuu789@gmail.com

Abstrak

Peran negara dan bangsa dalam menjaga ketertiban serta mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi masalah yang semakin mendesak di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Ketidakmerataan akses terhadap layanan publik, tingginya angka pengangguran, dan perbedaan kualitas kesejahteraan di berbagai daerah menunjukkan perlunya penilaian ulang terhadap pelaksanaan tanggung jawab negara sebagai negara kesejahteraan yang didasarkan pada hukum. Artikel ini bertujuan untuk meneliti kaitan antara fungsi negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta mengevaluasi seberapa besar tanggung jawab negara benar-benar dirasakan oleh warga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis deskriptif terhadap data survei mengenai akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses yang cukup terhadap layanan publik memiliki hubungan penting dengan tingkat kesejahteraan, khususnya pada kelompok usia produktif, meskipun masih ada perbedaan di antara wilayah. Temuan ini menambah wawasan empiris tentang fungsi negara dalam kerangka Pancasila dan konsep negara kesejahteraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan kebijakan publik yang merata dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan data lapangan yang lebih luas.

Kata Kunci: *negara kesejahteraan, peran negara, kesejahteraan masyarakat, Pancasila, kebijakan publik*

Abstract

The role of the state and nation in maintaining order and achieving public welfare has become an increasingly urgent issue amid social, economic, and political changes in Indonesia following the COVID-19 pandemic. Unequal access to public services, high unemployment rates, and disparities in welfare across regions highlight the need to reassess the state's responsibility as a welfare state based on the rule of law. This article aims to examine the relationship between the function of the state and the level of public welfare, as well as to evaluate the extent to which the state's responsibilities are actually felt by citizens. This study uses quantitative methods with a literature review approach and descriptive analysis of survey data on access to education, health, and social security. The results show that adequate access to public

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 569
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

services has a significant relationship with welfare levels, especially among the productive age group, although there are still differences between regions. These findings add to the empirical understanding of the function of the state within the framework of Pancasila and the concept of the welfare state. This study concludes that there is a need to strengthen equitable public policies that are tailored to the needs of the community, and recommends further research with broader field data.

Keyword: *welfare state, role of the state, public welfare, Pancasila, public policy*

PENDAHULUAN

Negara dan bangsa merupakan dua elemen krusial yang saling terhubung dan tak terpisahkan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, serta kenegaraan. Negara terbentuk sebagai sebuah entitas yang berwenang mengelola kehidupan masyarakat dengan tujuan menegakkan ketertiban, keamanan, dan kemakmuran bersama. Di sisi lain, bangsa adalah kumpulan orang yang memiliki persamaan dalam identitas, sejarah, budaya, serta aspirasi, dan tinggal di wilayah negara yang sama.

Dalam konteks Indonesia, peran negara dan bangsa sangat terkait erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara dan panduan hidup bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam menjalankan fungsi negara, baik sebagai regulator, pelindung, maupun penyedia layanan bagi masyarakat. Negara berkewajiban menjaga ketertiban melalui penegakan hukum serta berperan aktif dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat lewat pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Meski demikian, dalam praktiknya, peran negara dan bangsa dalam menjaga ketertiban serta mewujudkan kemakmuran masyarakat masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Masalah seperti ketimpangan sosial, pelanggaran hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, serta belum maksimalnya pelayanan publik menunjukkan bahwa peran negara belum sepenuhnya efektif. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang peran negara dan bangsa agar tujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan sejahtera dapat tercapai secara nyata.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research).Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang peran negara dan bangsa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis untuk mengkaji keterkaitan antara nilai Pancasila dengan peran negara dan bangsa dalam ketertiban dan kesejahteraan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa peran negara dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat terlihat dari indikator akses ke layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Data survei menunjukkan bahwa responden yang memiliki akses ke pendidikan dasar yang baik dan jaminan kesehatan melalui BPJS lebih sering melaporkan tingkat kesejahteraan yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya, dengan perbedaan yang signifikan pada kelompok usia produktif ($p < 0,05$). Temuan ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

di mana negara bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar warga sebagai hak asasi manusia, misalnya melalui sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia. Namun, meskipun secara teori Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, penerapannya di lapangan menunjukkan perbedaan yang jelas antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal dan pedesaan, yang menunjukkan ketimpangan pelayanan yang masih besar dan memengaruhi kesejahteraan kelompok tertentu.

Dalam konteks sosial dan perkembangan terkini, isu kesejahteraan semakin mendapat perhatian di tengah dinamika ekonomi dan politik Indonesia pasca-pandemi COVID-19. Banyak warga mengalami gangguan ekonomi karena pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan, sehingga persepsi terhadap kewajiban negara meningkat. Responden yang menganggap bahwa kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum sangat penting mencapai persentase tinggi dalam survei ini. Ini sejalan dengan temuan bahwa negara sebagai negara kesejahteraan berbasis hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial melalui mekanisme hukum dan kebijakan sosial yang efektif. Namun, penelitian sebelumnya, seperti yang dibahas oleh Habibulloh dan Maharani & Bahar, lebih banyak bersifat normatif dan belum mengukur dampak sosial nyata dari intervensi negara pada tingkat individu atau kelompok, sehingga ada kesenjangan data empiris dalam menjelaskan bagaimana peran negara secara langsung memengaruhi kesejahteraan responden di berbagai lapisan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan menjelaskan hubungan kuantitatif antara peran negara dan kesejahteraan masyarakat, serta menilai seberapa besar kewajiban negara dirasakan secara nyata oleh warga di berbagai kelompok demografis. Studi ini memberikan wawasan baru dengan menggabungkan data empiris kuantitatif dan konteks sosial yang aktual, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa negara dan bangsa saling berkaitan erat sebagai dasar kehidupan sosial di Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemakmuran melalui penegakan hukum serta pengembangan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa akses terhadap layanan publik seperti pendidikan yang baik, kesehatan melalui BPJS, dan jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan perbedaan yang signifikan pada kelompok usia produktif, sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. Namun, penerapan kebijakan ini dihadapkan pada kesenjangan antarwilayah, khususnya di daerah terpencil. Dalam situasi pasca-COVID-19, gangguan ekonomi akibat pengangguran telah memperkuat pandangan masyarakat tentang kewajiban negara sebagai negara kesejahteraan berbasis hukum untuk memastikan keadilan sosial. Dengan mengatasi kekurangan data empiris dari penelitian normatif sebelumnya, studi ini mengukur secara kuantitatif hubungan antara peran negara dan kesejahteraan, serta mengevaluasi pandangan warga dari berbagai kelompok demografis, sebagai landasan untuk menilai kebijakan publik yang adaptif guna mencapai masyarakat yang tertib dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Habibulloh, L. H. (2023). Urgensi pemenuhan hak warga negara menurut perspektif welfare state di Indonesia. Journal of Administrative and Social Science. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/108

[2] Joenaini Koenti, I. (2024). Kajian atas pemenuhan hak jaminan sosial melalui BPJS sebagai perwujudan negara kesejahteraan (welfare state). Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1894

[3] Maharani, K., & Bahar. (2025). Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik: Analisis kritis terhadap implementasi kebijakan sosial di Indonesia. Jurnal Fakta Hukum. https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/177

[4] Sitanggang, B. P. J. (2020). Peran aktif rakyat dan negara dalam kesejahteraan sosial terhadap tantangan pembangunan nasional. Jurnal Deliberatif. ([ejournal.gardapoli.or.id])